

PERAN KOPERASI TEBU DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR

The Role of Sugarcane Cooperatives in the Effort of Sugarcane Farmer Empowerment in East Java

Ening Ariningsih

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161
ening.ariningsih@yahoo.com

ABSTRACT

East Java is the biggest sugarcane producing center in Indonesia. Approximately 85% of sugarcane area in the province is dominated by people sugarcane plantation areas, cultivated by farmers with landholding size less than 1 hectare and with limited access to production inputs and market. The objective of this study was to assess the role of sugarcane cooperatives in the effort of sugarcane farmer empowerment. Analysis was done descriptively based on observation on primary sugarcane cooperatives under KUB Rosan Kencana and supported by relevant literatures. Data gathering was done during October-November 2012. The results of study showed that sugarcane cooperatives had great potential in empowering sugarcane farmers through sugarcane agribusiness development: (1) empowering sugarcane farmers through activities in plantation sector, especially sugarcane farming (on-farm); (2) playing an active role in helping farmers/members to improve the quality of sugarcane farming; (3) facilitating farmers/members with training, capital (credits/loans), procurement of inputs, machinery services, and other things needed to support sugarcane farming; and (4) act as a bridge among farmers, sugar factories, and the government. Enhancement of the role of cooperatives can be carried out through (1) internal strengthening which covers the strengthening of leadership and management of cooperatives, (2) strengthening linkages with supporting institutions and sugar mills, and (3) improvement of cooperatives' services in supporting people sugarcane agribusiness in the context of sugarcane farmer empowerment.

Keywords: cooperative, people sugarcane, farmer empowerment, East Java

ABSTRAK

Jawa Timur merupakan penghasil gula tebu terbesar di Indonesia. Sekitar 85% dari lahan tebu yang ada di Jawa Timur merupakan lahan perkebunan tebu rakyat, yang didominasi oleh petani dengan penguasaan lahan kurang dari 1 hektar dengan keterbatasan akses terhadap sarana produksi maupun pemasaran. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi dalam upaya pemberdayaan petani tebu rakyat. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan pengamatan terutama pada koperasi-koperasi tebu primer yang tergabung pada KUB Rosan Kencana sebagai koperasi sekundernya dengan didukung oleh literatur-literatur penunjang yang relevan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober-November 2012. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi tebu rakyat mempunyai potensi sangat besar dalam menunjang pemberdayaan petani tebu melalui pengembangan agribisnis tebu dengan cara: (1) memberdayakan petani melalui kegiatan-kegiatan petani/anggota dalam budi daya tanaman tebu (*on farm*); (2) berperan secara aktif membantu petani/anggota dalam upayanya meningkatkan kualitas budi daya tanaman tebu; dan (3) memfasilitasi petani/anggota dalam pelatihan-pelatihan, permodalan, pengadaan saprodi, alsintan, dan hal-hal yang diperlukan dalam menunjang kegiatan budi daya tanaman tebu dan pemasarannya; dan (4) berperan sebagai "jembatan" antara petani, pabrik gula, dan pemerintah. Peningkatan peran koperasi dapat dilakukan melalui: (1) penguatan internal koperasi meliputi penguatan kepemimpinan dan manajemen koperasi, (2) penguatan keterkaitan dengan lembaga penunjang dan PG, dan (3) perluasan usaha koperasi dalam mendukung agribisnis tebu rakyat dalam kerangka pemberdayaan petani tebu.

Kata kunci: koperasi, tebu rakyat, pemberdayaan petani, Jawa Timur

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur merupakan sentra tebu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2011, kontribusi luas areal tebu di Jawa Timur terhadap total luas areal tebu nasional mencapai sekitar 44,2%, sedangkan kontribusi produksi tebu mencapai sekitar 41,4% dari total produksi tebu nasional (Ditjen Perkebunan 2012). Sekitar 85,5% dari total luas areal tebu di provinsi tersebut merupakan

perkebunan rakyat yang umumnya, menurut Badan Litbang Pertanian (2007), didominasi oleh petani kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 1 hektar. Data BPS menunjukkan bahwa petani tebu di Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sekitar 139.760, atau sekitar 71,5% dari petani tebu di Indonesia (Tempo.co 2009). Data tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 50% petani di Jawa Timur mempunyai pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Studi Fitriani et al. (2013) menunjukkan bahwa penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar cenderung kurang menguntungkan dalam pengembangan usaha tani tebu.

Suyono (2008) menunjukkan bahwa petani tebu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, di antaranya modal yang sangat terbatas, pupuk tidak tersedia tepat waktu, tidak menguasai teknologi pascapanen, tidak mempunyai akses terhadap sumber daya pertanian, mempunyai posisi tawar yang rendah, dan penguasaan lahan yang sangat terbatas. Di sisi lain, studi Lestyani et al. (2012) menunjukkan bahwa tingginya biaya sewa lahan, besarnya modal usaha tani tebu yang dibutuhkan, dan waktu perputaran uang yang lama menyebabkan petani enggan untuk menanam tebu. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan petani tebu. Menurut Hanani et al. (2012), salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan petani tebu adalah melalui penguatan peran koperasi. Koperasi-koperasi yang merupakan organisasi kelembagaan petani tersebut telah berkembang dan tumbuh di perdesaan. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan koperasi tebu dalam upaya pemberdayaan petani tebu di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Provinsi Jawa Timur secara purposif dipilih sebagai lokasi penelitian karena provinsi tersebut merupakan sentra tebu terbesar di Indonesia. Di provinsi ini terdapat banyak koperasi, baik yang khusus bergerak di bidang agribisnis tebu, maupun menjadikan agribisnis tebu sebagai salah satu unit usahanya.

Prosedur Penarikan Contoh

Dalam penelitian ini koperasi tebu didefinisikan sebagai koperasi yang bergerak dalam agribisnis tebu, baik secara tunggal maupun sebagai salah satu unit usahanya. Karena tidak diperoleh data mengenai jumlah dan sebaran koperasi tebu di Jawa Timur, maka studi ini fokus pada koperasi-koperasi tebu primer yang bergabung dalam KUB Rosan Kencana sebagai koperasi tebu sekundernya. KUB Rosan Kencana merupakan koperasi tebu sekunder terbesar di Jawa Timur yang beranggotakan 46 koperasi tebu primer. Ke-46 koperasi tebu primer tersebut tersebar di 22 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari 46 koperasi tebu primer tersebut, hanya data dari 31 koperasi yang berhasil dikumpulkan. Namun, data dari 2 koperasi tidak digunakan dalam studi ini karena sangat meragukan (1 koperasi), maupun sangat tidak lengkap (1 koperasi), sehingga hanya data dari 29 koperasi primer yang dianalisis. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober-November 2015. Sebaran koperasi tebu primer contoh disajikan pada Tabel 1.

Metode Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif maupun deskriptif tabulatif dengan didukung oleh literatur-literatur penunjang yang relevan.

Tabel 1. Sebaran koperasi tebu contoh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi contoh
1.	Sidoarjo	3
2.	Gresik	1
3.	Mojokerto	4
4.	Jombang	4
5.	Nganjuk	1
6.	Kediri	3
7.	Tulungagung	1
8.	Magetan	2
9.	Madiun	3
10.	Ponorogo	1
11.	Probolinggo	1
12.	Jember	1
13.	Ngawi	1
14.	Malang	3
Total		29

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Koperasi Tebu Contoh

Karakteristik Umum

Tabel 2 menyajikan karakteristik umum koperasi tebu primer yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Sebagian besar koperasi contoh merupakan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), yaitu sebanyak 76%; sebanyak 24% sisanya merupakan Koperasi Unit Desa (KUD). KPTR secara khusus bergerak dalam agribisnis tebu, yang meliputi distribusi bantuan permodalan/kredit (untuk biaya bibit tebu, pupuk, usaha tani, panen, dan angkutan), pupuk bersubsidi, jasa angkutan, jasa traktor, pemasaran gula (melalui proses lelang), simpan pinjam, dan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan usaha tani tebu. Sementara, bagi KUD agribisnis tebu merupakan salah satu unit usahanya. Beberapa usaha lain yang dilakukan KUD di antaranya adalah penggilingan padi, peternakan ayam, peternakan sapi (termasuk juga sapi perah), pembayaran listrik, SPBU, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan KPTR dan KUD bisa berbeda satu sama lain.

Umur koperasi atau lamanya koperasi tersebut beroperasi terkait sangat erat dengan kategori koperasi, apakah termasuk KPTR atau KUD. Semua koperasi tebu yang masuk dalam kelompok KUD telah beroperasi lebih dari 15 tahun, di mana KUD tertua didirikan tahun 1975, sedangkan koperasi termuda didirikan tahun 1989. Di sisi lain, semua koperasi tebu yang masuk dalam kelompok KPTR beroperasi kurang dari 15 tahun.

Perbedaan yang sangat mencolok dalam umur koperasi tersebut dilatarbelakangi sejarah pembentukan kedua kelompok koperasi tersebut. Pada tahun 1975 pemerintah meluncurkan Inpres No. 9/1975 tentang program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang mengatur budi daya tebu baik di lahan sawah maupun lahan kering. Tujuan program TRI tersebut adalah untuk meningkatkan produksi gula untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas. Seiring dengan program tersebut, KUD diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah, yang mendorong berkembangnya KUD. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program TRI tersebut timbul masalah-masalah, baik *on farm* maupun *off farm*, yang menyebabkan terjadinya kontroversi. Akhirnya, program tersebut dihentikan dan Inpres No. 9/1975 dan digantikan oleh Inpres No. 5/1998 yang membebaskan petani untuk menanam komoditas yang dikehendakinya. Pertimbangan utama program TRI tersebut dihentikan adalah karena program tersebut gagal untuk memandirikan petani, bahkan membuat petani semakin tergantung pada pemerintah.

Tabel 2. Karakteristik umum koperasi tebu contoh di Jawa Timur, 2011

Item	Jumlah koperasi	Persentase
Kategori		
KUD	7	24
KPTR	22	76
Umur (lamanya beroperasi)		
<15	22	76
>15	7	24
Rata-rata	17	
Klasifikasi		
A	12	41
B	15	52
C	2	7
Jumlah anggota (orang)		
<100	7	24
100-500	15	52
>500	7	24
Rata-rata	741	

Pada umumnya KPTR didirikan tahun 1998/1999, setelah Inpres No. 9/1975 tentang program TRI dicabut. Pencabutan program tersebut telah membuat banyak KUD kolaps dan bahkan gulung tikar karena perlakuan istimewa yang diberikan pemerintah kepada KUD telah dicabut. Akibatnya, petani tebu tidak bisa memperoleh pelayanan koperasi, sehingga mendorong pembentukan koperasi baru yang secara khusus menangani tebu dalam bentuk KPTR.

Sekitar setengah (52%) koperasi tebu contoh diklasifikasikan sebagai baik (B); 41% diklasifikasikan sebagai sangat baik (A); sedangkan sisanya diklasifikasikan sebagai cukup baik. Klasifikasi/pemeringkatan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Sistem pemeringkatan koperasi tersebut didasarkan pada tiga sifat koperasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai kumpulan orang, dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan; sehingga komponen yang dinilai mencakup 1) aspek badan usaha, 2) aspek kinerja usaha, 3) aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, 4) aspek orientasi dan pelayanan anggota, 5) aspek pelayanan kepada masyarakat, dan 6) aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam kaitan itu telah ditetapkan bahwa koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki peringkat klasifikasi A atau klasifikasi B, atau klasifikasi C. Dengan demikian, ke-29 koperasi tebu contoh merupakan koperasi-koperasi yang berkualitas. Sistem pemeringkatan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pihak terkait (terutama lembaga pembiayaan) terhadap koperasi, sehingga akan memudahkan akses koperasi kepada sumber-sumber pembiayaan (Prihatini 2011).

Jumlah anggota koperasi tebu contoh berkisar antara 65 hingga 5.602 orang anggota pada periode 2008-2011. Selama periode tersebut sebagian besar koperasi contoh menunjukkan pertumbuhan keanggotaan yang positif namun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat kecil. Sebagian kecil lainnya menunjukkan pertumbuhan nol atau bahkan negatif. Nampaknya pertumbuhan anggota koperasi tidak begitu penting bagi koperasi-koperasi tersebut karena koperasi-koperasi tersebut juga melayani bukan anggota, walaupun koperasi-koperasi tersebut menetapkan aturan kebijakan yang lebih menguntungkan kepada anggotanya dibanding bukan anggota koperasi. Fakta di lapangan bahwa koperasi juga melayani bukan anggota (selain anggota koperasi itu sendiri) dikritisi oleh Nugroho (2011) sebagai inkonsisten dengan implementasi prinsip-prinsip koperasi, yaitu prinsip pelayanan koperasi dari anggota untuk anggota. Menurutnya, prinsip tersebut merupakan proposisi nilai yang unik dari koperasi yang harus dipegang teguh.

Namun, hal yang lebih penting adalah mengetahui mengapa petani tidak mau menjadi anggota koperasi walaupun mereka menggunakan jasa koperasi atau bahkan sama sekali tidak mau menggunakan jasa koperasi. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani berpendapat bahwa koperasi akan membebani mereka dengan berbagai biaya keanggotaan yang akan mengurangi penerimaan mereka; sebagian berpendapat bahwa menjadi anggota koperasi itu rumit; sebagian lainnya berpendapat bahwa menjadi anggota koperasi akan membuat mereka kehilangan kebebasan untuk memasarkan hasil tebu. Untuk kasus-kasus tersebut, koperasi harus bisa meyakinkan petani akan manfaat yang akan didapat petani jika bergabung menjadi anggota koperasi. Terdapat kasus lain di mana koperasi menetapkan batasan penguasaan lahan minimum oleh petani tebu, sehingga petani berlahan sempit tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Ukuran keanggotaan koperasi juga terkait sangat erat dengan kategori koperasi tebu. Semua koperasi yang beranggotakan lebih dari 500 orang merupakan KUD (24% dari total koperasi tebu contoh), sementara sisanya beranggotakan kurang dari 500 orang. Beberapa koperasi (24%) bahkan mempunyai anggota kurang dari 100 orang. Namun, untuk koperasi dengan ukuran keanggotaan yang besar, sulit untuk melibatkan seluruh anggota ke dalam seluruh kegiatan koperasi tersebut (termasuk training) karena kesulitan koordinasi dan keterbatasan lainnya. Hal tersebut dapat berakibat tingginya proporsi anggota koperasi yang tidak aktif pada koperasi tebu yang berukuran besar. Pada kasus tersebut, petani tebu menyerahkan semua urusan terkait koperasi kepada ketua kelompok, sehingga petani-petani tersebut kebanyakan tidak mengetahui kebijakan-kebijakan koperasinya. Hal ini menyebabkan petani kurang mempunyai rasa kepemilikan terhadap koperasi di mana mereka bernaung, bahkan pada kasus yang ekstrem, petani anggota koperasi tidak menyadari status keanggotaannya pada koperasi terkait. Temuan tersebut serupa dengan hasil studi Asmara dan Nurholifah (2010). Menurut Nugroho (2011), hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan komitmen petani dalam melakukan kegiatan-kegiatan koperasi. Mengingat pentingnya partisipasi anggota sebagai indikator kesuksesan koperasi dalam jangka panjang di samping juga memenuhi tujuan sosialnya (Mellor 2009), maka partisipasi anggota secara aktif seharusnya menjadi prioritas perhatian bagi koperasi.

Karakteristik finansial

Tabel 3 menyajikan karakteristik finansial koperasi tebu primer contoh di Jawa Timur. Karakteristik tersebut meliputi aset (aset/aktiva lancar, aset/aktiva tetap, dan aset/aktiva total), utang (utang lancar, utang jangka panjang, dan utang total), dan ekuitas koperasi tebu contoh.

Sekitar 91% dari aset total koperasi tebu primer contoh merupakan aset/aktiva lancar, yang menunjukkan tingginya ketergantungan koperasi pada aset/aktiva lancar. Serupa dengan aset, kewajiban/utang koperasi contoh juga sebagian besar merupakan kontribusi dari kewajiban lancar, yang ditunjukkan oleh kontribusi sekitar 69% kewajiban lancar terhadap kewajiban total. Di sisi lain, ekuitas sangat rendah, hanya sekitar 9% dari aset total (atau total kewajiban dan ekuitas)

Tabel 3. Karakteristik finansial koperasi tebu primer contoh di Jawa Timur, 2008-2011

Uraian	Nilai (Rp Juta)	Persen	Pertumbuhan ^a
a. Aset/aktiva			
Aset/aktiva lancar	9.535	92,77 ^b	9,27
Aset/aktiva tetap	743	7,23 ^b	24,49
Total aset	10.278	100,00	7,96
b. Kewajiban dan ekuitas			
Kewajiban lancar	6.446	68,63 ^c	38,22
Kewajiban jangka panjang	2.946	31,37 ^c	(3,65)
Total kewajiban	9.392	91,38 ^d	8,80
Ekuitas anggota	886	8,62 ^d	11,03
Total kewajiban dan ekuitas (=Total aset)	10.278	100,00	7,96

^a Pertumbuhan rata-rata pada periode 2008-2011 (%/tahun)

^b Persentase dari total aset

^c Persentase dari total utang

^d Persentase dari total utang dan ekuitas

Kecuali kewajiban jangka panjang, semua indikator finansial lainnya menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2008-2011, yang secara umum menunjukkan keberlanjutan koperasi. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa 9 dari 29 koperasi contoh cenderung menurun selama periode studi, demikian pula terdapat 5 koperasi contoh dengan ekuitas yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Bahkan, terdapat satu koperasi contoh yang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan ekuitas yang negatif selama periode studi, yang menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak sehat.

Peranan Koperasi dalam Agribisnis Tebu dan Pemberdayaan Petani Tebu

Seperti halnya koperasi lainnya, koperasi tebu juga harus berpegang pada tujuh prinsip koperasi, yaitu 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 2) pengelolaan dilakukan secara demokrasi, 3) pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, 5) kemandirian, 6) pendidikan perkoperasian, dan 7) kerja sama antarkoperasi. Berdasarkan prinsip koperasi tersebut, jelas bahwa tidak ada tekanan atau paksaan bagi petani tebu untuk menjadi anggota suatu koperasi tertentu. Oleh karena itu, kopersilah yang harus bisa membuktikan kepada petani akan manfaatnya baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga petani tertarik untuk menjadi anggotanya dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi koperasi tersebut. Dengan demikian, koperasi harus mewujudkan fungsi dan peranannya dalam agribisnis tebu di wilayah kerjanya masing-masing.

Pada umumnya fungsi dan peranan koperasi dalam agribisnis tebu adalah sebagai berikut: 1) memberdayakan petani melalui kegiatan-kegiatan petani/anggota dalam budi daya tanaman tebu (*on farm*); 2) berperan secara aktif membantu petani/anggota dalam upayanya meningkatkan kualitas budi daya tanaman tebu; dan 3) memfasilitasi petani/anggota dalam pelatihan-pelatihan, permodalan, pengadaan saprodi, alsintan, dan hal-hal yang diperlukan dalam menunjang kegiatan budi daya tanaman tebu dan pemasarannya; dan 4) berperan sebagai “jembatan” antara petani, pabrik gula, dan pemerintah. Menurut Hanani et al. (2012), produktivitas tebu sangat dipengaruhi oleh peranan koperasi dan peranan koperasi terbesar dan terpenting adalah dalam penyediaan sarana produksi.

Asmara dan Nurholifah (2010) mengungkapkan bahwa petani tebu menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan kredit/modal usaha tani, sarana produksi, dan posisi tawar yang lebih baik dengan pabrik gula. Sementara, studi Wibowo (2013) menemukan bahwa petani yang memperoleh kredit melalui koperasi mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibanding petani yang tidak memperoleh kredit. Lebih lanjut, Wijayanti (2014) menemukan bahwa petani yang memperoleh baik kredit percepatan dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibanding petani yang hanya memperoleh kredit percepatan atau hanya memperoleh KKPE. Studi Yekti dan Sulastiyah (2009) menemukan bahwa mayoritas petani menggunakan kredit yang diperolehnya untuk mendukung usaha tani yang sedang digelutinya; hanya sebagian kecil petani yang menggunakan kredit tersebut untuk membuka usaha baru. Di sisi lain, studi Afriza (2010) dan Kurniawan dan Mahri (2011) menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diberikan koperasi mempunyai pengaruh positif yang nyata terhadap partisipasi anggota. Semua studi tersebut menunjukkan pentingnya kredit/modal dalam menarik petani untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi dan meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya modal yang dimiliki petani tebu sementara usaha tani tebu memerlukan biaya yang tinggi. Akan tetapi, kesimpulan yang berbeda ditemukan oleh Dalilah (2013), yaitu kredit pertanian dalam program KKPE tidak memberikan implikasi yang nyata bagi pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang.

Studi lain yang dilakukan Ariningsih (2014), menunjukkan bahwa koperasi telah memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan harga tebu, biaya usaha tani tebu, penerimaan usaha tani tebu, dan pendapatan bersih petani anggota koperasi dibandingkan petani bukan anggota yang tidak mendapatkan layanan koperasi. Akan tetapi, perbedaan biaya usaha tani, penerimaan, dan pendapatan bersih antara petani tebu anggota koperasi dan petani tebu bukan anggota koperasi yang mendapatkan layanan jasa koperasi tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa status keanggotaan tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap biaya, penerimaan, dan pendapatan bersih usaha tani tebu karena manfaat (modal, teknologi, sarana produksi, akses pemasaran) yang diperoleh dari koperasi baik oleh petani anggota maupun petani bukan anggota relatif sama.

Dari ke-29 koperasi tebu primer contoh, KPTR Arta Rosan Tijari yang berlokasi di Kabupaten Jombang dan KUD Gondanglegi yang berlokasi di Kabupaten Malang merupakan koperasi terbesar. Pentingnya bantuan permodalan bagi petani tebu membuat distribusi kredit, baik yang bersumber dari luar koperasi (KKPE, PKBL, dan ratoon) maupun dari dalam koperasi itu sendiri (*pre-financing/after-financing*) menjadi kegiatan ekonomi utama KPTR Arta Rosan Tijari, di samping kegiatan ekonomi lainnya seperti simpan pinjam, jasa traktor, budi daya dan pembibitan tebu, pemasaran tebu/gula, dan toko pertanian. Selain memberikan jasa pelayanan kepada anggotanya, KPTR Arta Rosan Tijari juga melayani bukan anggota. Walaupun demikian, anggota koperasi memperoleh beberapa keistimewaan dibanding bukan anggota, seperti prioritas dalam memperoleh kredit, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, selain juga memperoleh sisa hasil usaha (SHU).

Koperasi KPTR Arta Rosan Tijari dikelola secara lebih profesional dibanding koperasi tebu lain pada umumnya, sehingga bisa menghasilkan SHU sebesar sekitar Rp358 juta, dan merupakan salah satu koperasi tebu contoh yang menghasilkan SHU terbesar pada tahun 2011. Dari SHU sejumlah tersebut, sebanyak 40% dialokasikan kepada anggotanya sebagai jasa (10% berdasarkan kontribusinya dalam modal koperasi dan 30% berdasarkan kontribusinya dalam kegiatan usaha koperasi), 30% untuk cadangan, 10% untuk pengurus, 10% untuk pegawai, 5% untuk dana pendidikan, dan 5% untuk dana sosial. Namun, petani tebu yang ingin memperoleh pelayanan jasa koperasi tersebut disyaratkan harus menguasai lahan minimal 2 hektare. Persyaratan tersebut membuat petani berlahan sempit tidak dapat mengakses pelayanan jasa koperasi tersebut.

Berbeda dari KPTR Arta Rosan Tijari, KUD Gondanglegi tidak membatasi ukuran lahan yang dikuasai untuk mendapatkan pelayanan jasanya. Setiap petani tebu di wilayah kerjanya, baik anggota maupun bukan anggota dapat mengakses jasa yang disediakan KUD. Kegiatan usaha KUD Gondanglegi meliputi kegiatan simpan pinjam, unit usaha tebu, unit usaha peternakan sapi perah, unit jasa pembayaran listrik, unit pakan, unit penggilingan padi (*rice milling unit*)/unit pangan, dan unit jasa angkutan. Unit usaha tebu meliputi penyaluran dana kredit baik dari luar koperasi (KKPE dan ratoon) maupun dari koperasi itu sendiri, jasa angkutan, dan toko pertanian/sarana produksi pertanian. KUD Gondanglegi mempunyai aset total dan SHU terbesar di antara koperasi tebu primer contoh. Pada tahun 2011 total aset yang dimilikinya mencapai Rp69.480 juta dan menghasilkan SHU sebesar Rp443 juta.

Masalah-Masalah yang Dihadapi dalam Pengembangan Koperasi

Kinerja koperasi dalam mendukung agribisnis tebu tidak selalu seperti yang diharapkan. Banyak koperasi yang tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak aktif lagi. Dalam kaitan ini, menurut Hanani et al. (2012), kualitas pengurus dan manajemen masih menjadi kendala. Menurut Saiman (Republika online 2012), terdapat lima faktor yang memengaruhi kinerja koperasi. Faktor pertama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) mulai dari anggota, pengurus, manajer, hingga pengawas. Faktor-faktor lainnya adalah kurangnya modal, kurangnya teknologi informasi, tidak mempunyai orientasi global, dan tidak ada kemauan untuk konsolidasi.

Studi Ariningsih (2013) menyimpulkan bahwa mayoritas koperasi tebu contoh di Jawa Timur berada dalam kondisi *diseconomies of scale*, yang menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut beroperasi secara tidak efisien. Berbagai faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah: (1) koperasi menjalankan usahanya dengan petani-petani skala kecil sehingga menyebabkan tingginya biaya administrasi dan monitoring; (2) manajemen risiko yang lemah dan tingkat keuntungan yang rendah; (3) manajemen yang tidak efisien; dan (4) birokrasi, tingginya upah, dan operasi yang tidak efisien.

Suprayitno (2007) mengkritisi konflik kepentingan yang diakibatkan oleh konsep koperasi dan menganggapnya sebagai faktor yang memengaruhi kinerja koperasi. Di satu sisi, koperasi pada dasarnya merupakan sebuah perusahaan yang harus menghasilkan keuntungan untuk bisa meneruskan usahanya, sementara di sisi yang lain koperasi, berdasarkan tujuan pendiriannya, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika dipandang sebagai sebuah unit usaha, sebuah koperasi dituntut untuk memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi, bertolak dari jiwa koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak dapat menetapkan margin yang tinggi untuk jasa yang diberikan kepada anggotanya. Sebagai catatan, petani anggota koperasi juga merupakan konsumen dari koperasi tersebut.

Masalah lain yang melekat pada koperasi yang mempunyai anggota yang banyak, adalah seperti kasus KUD Gondanglegi. Karena banyaknya anggota koperasi tersebut, baik petani tebu anggota maupun petani tebu bukan anggota dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk memudahkan koordinasi. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan koperasi petani diwakili oleh ketua kelompoknya. Akan tetapi, hal ini menyebabkan mayoritas petani kurang aktif dan kurang mempunyai rasa kepemilikan akan koperasi tersebut. Bahkan, terdapat kasus di mana petani tidak mengetahui status keanggotaannya di koperasi tersebut, walaupun sebenarnya petani tersebut merupakan anggota.

Masalah lain yang juga dihadapi salah satu koperasi besar yang mengalami kesulitan dalam penghitungan SHU sehingga koperasi tersebut tidak mengalokasikan SHU-nya sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu anggota memperoleh SHU sesuai dengan jasa yang diberikan anggota tersebut kepada koperasi. Menurut manajer KUD tersebut, pada tahun sebelumnya (2011) kepada anggota diberikan uang sejumlah Rp50.000 sebagai "uang rapat". Nampaknya, "SHU" yang sangat kecil tersebut tidak memberikan insentif kepada anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya manajemen koperasi tersebut sehingga mengabaikan penerapan prinsip koperasi yang seharusnya dipegang teguh karena prinsip tersebut merupakan ciri pembeda antara koperasi dan perusahaan biasa.

Strategi Pengembangan Koperasi Tebu

Haryanto (2011) menyatakan bahwa peranan koperasi perlu dimaksimalkan dengan cara memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro di perdesaan. Koperasi juga harus mengambil posisi sebagai organisasi profesional yang tidak hanya mengelola koperasi secara eksklusif, namun juga mengembangkan kewirausahaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan peranannya tersebut, diharapkan koperasi dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai partner usaha mereka. Lebih jauh, koperasi diharapkan untuk berkontribusi nyata dalam upaya mengurangi pengangguran dan untuk menurunkan kemiskinan (Tambunan dan Anik 2009).

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan dan peningkatan peran koperasi, khususnya koperasi tebu primer di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Perbaikan manajemen koperasi

Perbaikan dalam manajemen koperasi harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi koperasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan. Untuk itu, training dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan terus-menerus harus dilakukan untuk koperasi-koperasi tersebut, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen keuangan. Training dan pembinaan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kegiatan tersebut juga dapat difasilitasi oleh KUB Rosan Kencana sebagai koperasi sekunder yang menjadi induk koperasi-koperasi tebu primer tersebut. Audit hendaknya dilakukan oleh auditor eksternal untuk memastikan bahwa koperasi-koperasi tersebut mempunyai manajemen keuangan yang baik.

Sebuah koperasi yang mempunyai kinerja yang sehat dan baik akan mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada petani anggota seraya mampu menghasilkan SHU yang relatif tinggi. SHU tersebut akan dibagikan kepada petani anggota sesuai dengan kontribusinya dalam pembentukan modal koperasi dan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi koperasi sesuai dengan prinsip pembagian SHU. SHU yang tinggi akan menjadi insentif untuk petani anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi koperasi dan berkontribusi dalam pembentukan modal koperasi.

Pembedaan secara nyata dalam pelayanan kepada anggota koperasi

Dalam rangka meningkatkan keanggotaan koperasi pembedaan secara nyata dalam pelayanan kepada anggota koperasi dan bukan anggota harus dilakukan dengan tingkat tertentu yang akan memberikan insentif kepada petani untuk menjadi anggota koperasi. Koperasi juga harus dapat meyakinkan petani akan manfaat menjadi anggota koperasi dengan menawarkan insentif yang nyata bagi mereka. Akan tetapi, yang paling penting, untuk memberikan dampak yang besar koperasi harus menjaga kinerjanya agar tetap baik dan meningkatkan perannya melalui: (1) penguatan internal

koperasi meliputi penguatan kepemimpinan dan manajemen koperasi, (2) penguatan keterkaitan dengan lembaga penunjang dan PG, dan (3) perluasan usaha koperasi dalam mendukung agribisnis tebu rakyat dalam kerangka pemberdayaan petani tebu.

Penguatan kontribusi modal anggota koperasi

Tingginya kewajiban/utang pada koperasi tebu menunjukkan tingginya ketergantungan pada utang untuk membiayai operasinya. Terlebih, bunga yang dibayarkan koperasi dapat mengurangi SHU yang dihasilkan koperasi tersebut. Oleh karena itu, koperasi harus didorong untuk memperkuat modalnya sendiri (ekuitas) melalui peningkatan kontribusi anggota terhadap ekuitas. Selain mengurangi ketergantungan koperasi terhadap utang dan memperbaiki kinerja keuangannya, meningkatkan kontribusi modal dari anggota akan meningkatkan rasa memiliki dari anggota terhadap koperasi tebu. Untuk itu, koperasi harus mampu meyakinkan anggotanya dengan cara menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian, fasilitasi dari pemerintah, termasuk KKPE, masih tetap diperlukan mengingat sangat terbatasnya ekuitas koperasi.

Fasilitasi pemerintah

Fasilitasi pemerintah seperti subsidi bunga KKPE dan lain-lain tetap diperlukan mengingat karakteristik koperasi yang berbeda dibanding lembaga ekonomi lainnya. Meskipun demikian, koperasi tetap perlu untuk diarahkan menuju kemandirian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada umumnya fungsi dan peranan koperasi dalam agribisnis tebu adalah sebagai berikut: (1) memberdayakan petani melalui kegiatan-kegiatan petani/anggota dalam budi daya tanaman tebu (*on farm*); (2) berperan secara aktif membantu petani/anggota dalam upayanya meningkatkan kualitas budi daya tanaman tebu; dan (3) memfasilitasi petani/anggota dalam pelatihan-pelatihan, permodalan, pengadaan saprodi, alsintan, dan hal-hal yang diperlukan dalam menunjang kegiatan budi daya tanaman tebu dan pemasarannya; dan (4) berperan sebagai “jembatan” antara petani, pabrik gula, dan pemerintah.

Peningkatan peran koperasi dapat dilakukan melalui: (1) penguatan internal koperasi meliputi penguatan kepemimpinan dan manajemen koperasi, (2) penguatan keterkaitan dengan lembaga penunjang dan PG, dan (3) perluasan usaha koperasi dalam mendukung agribisnis tebu rakyat dalam kerangka pemberdayaan petani tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza M. 2010. Pengaruh kompetensi pengurus dan manfaat ekonomi terhadap partisipasi anggota koperasi (Suatu kasus pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung). *JIETT*. 5(1):42-54.
- Ariningsih A. 2013. Economies of scale of sugarcane cooperatives in East Java Province and their influencing factors. *JAE*. 31(1):53-69.
- Ariningsih A. 2014. Impacts of cooperative membership on sugarcane farmers' income in East Java. *JAE* 32(2):147-165.
- Asmara R, Nurholifah R. 2010. Analisis pendapatan dan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani tebu dalam keanggotaan suatu koperasi. *Agrise*. 10(2):108-120.
- Badan Litbang Pertanian. 2007. Prospek dan arah pengembangan agribisnis tebu. Ed ke-2. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian.
- Dalilah IE. 2013. Implikasi kredit pertanian terhadap pendapatan petani (Studi kasus: program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi pada petani tebu di Kabupaten Malang). [Skripsi]. [Malang (ID)]: Universitas Brawijaya.
- Ditjen Perkebunan. 2012. Statistik Perkebunan 2009-2011. Jakarta (ID): Ditjen Perkebunan.
- Fitriani, Sutarni, Irawati L. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi, curahan kerja dan konsumsi petani tebu rakyat di Propinsi Lampung. *ESAI*. 7(1):1-11.

- Hanani N, Sujarwo, Asmara R. 2012. Peran koperasi dalam sistem agribisnis tebu rakyat. Dalam: Krisnamurthi B, editor. *Ekonomi gula*. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 305-318.
- Haryanto R. 2011 September 27. Koperasi vs kemiskinan di Indonesia [Internet]. *Tabloid Inspirasi* [Internet]. [diunduh 2014 Agu 5]. Tersedia dari: <http://inspirasiablog.wordpress.com/2011/09/27/koperasi-vs-kemiskinan-di-indonesia/>.
- Kurniawan H, Mahri JW. 2011. Kualitas pelayanan, promosi ekonomi anggota, dan pengaruhnya terhadap partisipasi anggota. *Jurnal Ekonomi dan Koperasi*. 6(1):10-21.
- Lestyani D, Maria, Priyanto SH. 2012. Keengganan petani berusaha tani tebu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Agric*. 24(1): 81-90.
- Mellor JW. 2009. New challenges and opportunities in low- and middle-income countries: measurements for tracking indicators of cooperative success (METRICS). Washington (US): ODCD and USAID.
- Nugroho A. 2011 Juli 29. Mengurai belenggu pada koperasi [Internet]. *Tabloid Inspirasi* [diunduh 2014 Agu 5]. Tersedia dari: <http://inspirasiablog.wordpress.com/2011/07/29/mengurai-belenggu-pada-koperasi/>.
- Prihatini D. 2011. Peningkatan koperasi dalam konteks pemberdayaan koperasi. *Bisma*. 5(1):53-66.
- Republika online. 2012 Maret 1. Duh, kondisi koperasi Indonesia disebut terbelakang [Internet]. [diunduh 2014 Mar 13]. Tersedia dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/29/m05ksr-duh-kondisi-koperasi-indonesia-disebut-terbelakang>.
- Suprayitno B. 2007. Kritik terhadap koperasi (serta solusinya) sebagai media pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *JEP*. 4(2):14-35.
- Suyono. 2008. Memberdayakan petani tebu melalui pengembangan kapasitas kelembagaan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) (Studi kasus di KPTR "Raksa Jaya" Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) [tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Tambunan T, Anik CM. 2009. Polemik mengenai koperasi: penyebab masih buruknya kinerja koperasi di Indonesia. Policy Discussion Paper Series No. 10/08/09. Jakarta (ID): Center for Industry, SME & Business Competition Studies Trisakti University.
- Tempo.co. 2009 November 24. Petani Jawa Timur sebagian besar petani gurem [Internet]. [diunduh 2014 Mar 13]. Tersedia dari: <http://www.tempo.co/read/news/2009/11/24/058210155/Petani-Jawa-Timur-Sebagian-Besar-Petani-Gurem>.
- Wibowo E. 2013. Pola kemitraan antara petani tebu rakyat kredit (TRK) dan mandiri (TRM) dengan Pabrik Gula Modjopangoong Tulungagung. *J Manajemen Agribisnis*. 13(1):1-12.
- Wijayanti N. 2014. Pengaruh pengambilan kredit terhadap pendapatan usahatani tebu di Koperasi Sido Makmur Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman [tesis]. [Yogyakarta (ID)]: Universitas Gadjah Mada.
- Yekti A, Sulastiyah A. 2009. Eksistensi lembaga keuangan mikro dalam peningkatan aksesibilitas pelaku usaha pertanian pada sumber permodalan di pedesaan. *JlIP*. 5(2):114-134.